



BUPATI WONOSOBO

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
WONOSOBO
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN JAWABAN
EKSEKUTIF ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN WONOSOBO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2024**

SELASA, 24 JUNI 2025

Assalamu 'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati:

- Saudara Ketua, Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Wakil Bupati Wonosobo;
- Sekretaris Daerah beserta para jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Rekan-rekan pers, serta hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu;

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri pertemuan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, dengan agenda jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 ini, sesuai dengan agenda pemerintahan daerah.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Wonosobo, atas pandangan umum yang telah disampaikan. Berbagai pendapat, himbauan, saran, pertanyaan, hingga koreksi yang diberikan, kami pandang sebagai bentuk kontribusi yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap RAPERDA dimaksud, yang telah disampaikan pada rapat paripurna hari Senin tanggal 23 Juni 2025, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan umum sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebesar 64,17 persen, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa pendapatan transfer direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya. Hal ini

berimplikasi pada keterbatasan kas yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga pedapatan dari jasa giro yang diperoleh relatif kecil.

- b. Bahwa dalam proses perencanaan, terdapat kesalahan pengelompokan rekening pada target pos Lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, hal tersebut telah dilakukan koreksi dan penyesuaian pada laporan realisasi yang telah di audit.
2. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah konkret, antara lain melalui optimalisasi penerimaan, khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor dimaksud, dilakukan melalui pendekatan **intensifikasi dan ekstensifikasi**.

Strategi intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, pendekatan persuasif kepada para wajib pajak dan wajib retribusi, pendataan atau visitasi langsung terhadap potensi pajak di lapangan, pemeriksaan terhadap kepatuhan pembayaran pajak, serta penegakan ketentuan melalui pemberian sanksi terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Sementara itu, **strategi**

ekstensifikasi diarahkan pada upaya optimalisasi potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara maksimal, seperti pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan pajak hiburan.

3. Berkaitan dengan rendahnya penyerapan belanja tidak terduga yang hanya 10,62 persen. Dapat kami jelaskan bahwa pada APBD tahun anggaran 2024, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar **5,5 miliar rupiah**. Sepanjang Tahun Anggaran berjalan, usulan kegiatan yang diajukan untuk didanai melalui pos belanja tersebut cukup banyak, dan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim yang berwenang, sebagian besar usulan tersebut memenuhi kriteria sebagai keperluan yang bersifat mendesak.

Mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo, khususnya pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwa tatacara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari pos belanja tidak terduga ke dalam belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja SKPD yang membidangi. Oleh sebab itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wonosobo

Nomor 000.7.5/132/2024 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 sejumlah **3,38 miliar rupiah** yang semula dari belanja tidak terduga dialihkan ke program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan peruntukannya. Adapun sisa anggaran belanja tidak terduga sebesar **2,12 miliar rupiah** direalisasikan sebesar **225,21 juta rupiah** untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun 2023, berupa penyelesaian tuntutan ganti rugi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Perusahaan Daerah (PD) Bhakti Husada yang merupakan hak dari Perusahaan yang bersangkutan.

4. Mengenai upaya atau strategi agar belanja pegawai mencapai 30 persen dari total belanja pegawai dalam APBD sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 antara lain dengan menaikkan pendapatan daerah dan moratorium pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan BMD. Terhadap aset milik daerah yang dinilai tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, telah

dilakukan upaya pemanfaatan melalui berbagai skema, seperti sewa, pinjam pakai, serta Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Kontribusi pemanfaatan BMD terhadap peningkatan PAD dapat tercermin dari realisasi penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah yang mencapai **122,15 persen** dari target yang ditetapkan sebesar **5,58 miliar rupiah** pada tahun anggaran 2024 atau terealisasi sebesar **6,82 miliar rupiah**. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMD, pada tahun 2025 akan dilaksanakan identifikasi terhadap aset daerah yang idle atau memiliki potensi nilai ekonomis untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, guna meningkatkan kontribusi BMD terhadap penerimaan daerah.

6. Dalam penyajian laporan keuangan daerah tahun 2024 yang telah di audit, tercatat Defisit Laporan Operasional (LO) sebesar **113,75 miliar rupiah**. Sebagaimana dimaklumi, LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang menambah dan/atau mengurangi ekuitas pemerintah. Perhitungan Defisit pada laporan ini diperoleh dari komponen Kegiatan Operasional, Kegiatan Non-Operasional, serta Pos Luar Biasa. Perlu kami tekankan bahwa LO disusun berbasis akrual atau mengakui hak/kewajiban keuangan saat timbulnya transaksi,

berbeda dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun berbasis kas atau pengakuan terjadi saat aliran kas masuk dan/atau keluar. Oleh karena itu, Defisit LO merupakan selisih pendapatan dan beban berdasarkan standar akuntansi, termasuk pengakuan piutang, kewajiban, dan penyusutan asset. Dengan demikian, defisit pada LO dan tidak selalu mencerminkan kondisi kas riil termasuk tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan kas sebagaimana yang tergambar dalam defisit pada LRA. Dengan penjelasan tersebut, kami berharap tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan posisi defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang Kami Hormati,

Dampak pelaksanaan dari APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 terhadap kesejahteraan masyarakat, secara umum menunjukkan arah yang positif. Hal ini tercermin dari semakin menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami perbaikan. Perbandingan capaian indikator kesejahteraan masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,30 persen naik menjadi 4,57 persen;

- b. Persentase penduduk miskin menurun dari 15,58 persen menjadi 15,28 persen;
- c. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,95 persen menjadi 4,02 persen; dan
- d. Indeks Pembangunan manusia meningkat dari 70,18 menjadi 70,63.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 khususnya dalam pemenuhan target IPM, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merealisasikan program-program unggulan, yaitu Wonosobo sehat untuk meningkatkan usia harapan hidup, Wonosobo pintar untuk meningkatkan rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta Wonosobo makmur untuk peningkatan daya beli masyarakat. Melalui **Wonosobo pintar**, Pemerintah Daerah memperluas akses pendidikan, menekan angka anak tidak sekolah, dan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Di sisi lain, **Wonosobo sehat** berfokus pada peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemenuhan jaminan kesehatan, percepatan penurunan stunting dan upaya preventif dan promotif di bidang kesehatan. Pada program unggulan **Wonosobo makmur** telah dilakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan

keterampilan, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), program Kredit Usaha Rakyat (KURDA) maer, dan program perlindungan sosial yang menysasar pada kelompok rentan. Sinergi antar program ini tidak hanya meningkatkan indikator IPM, tetapi juga menurunkan angka kemiskinan. Dari 3 program unggulan ini, tentunya tidak lepas dari arah kebijakan anggaran yang memprioritaskan pada pencapaian target prioritas pembangunan salah satunya adalah IPM. Meskipun capaian IPM Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten tetangga, namun Pemerintah Daerah menyambut positif bahwa dari tahun ke tahun tren peningkatan IPM tetap terjaga secara konsisten.

Sehubungan dengan belum terserapnya anggaran 100 persen pada tiga perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, dapat kami jelaskan bahwa sisa anggaran dimaksud berasal dari sisa belanja pegawai, sisa anggaran dari hasil negosiasi pengadaan barang atau jasa dan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan karena pertimbangan efisiensi dan optimalisasi belanja yang dilakukan selama tahun berjalan. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa ketidakterserapan anggaran tersebut tidak mempengaruhi pencapaian kinerja secara keseluruhan. Seluruh target output utama tetap dapat

dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas program dan kegiatan tetap terjaga sebagaimana perencanaan.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang Kami Hormati,

Sebelum menutup penjabaran dari penjelasan ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Ketua, Panitia Khusus dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Perlu saya sampaikan, bahwa dalam rangka penetapan Raperda, masih memerlukan proses Permohonan Noreg kepada Gubernur Jawa Tengah, sebagai langkah terakhir sebelum rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun demikian, saya yakin rancangan peraturan daerah yang telah kita setuju bersama ini, merupakan salah satu langkah kita untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat, guna menunjang pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran, masukan dan pandangan konstruktif yang telah diberikan oleh seluruh fraksi, yang tentu menjadi bagian penting dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Kami menyadari bahwa penjelasan yang disampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, pembahasan secara lebih mendalam akan dilanjutkan melalui forum rapat-rapat Badan Anggaran DPRD, guna memperkaya substansi serta menyempurnakan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kami berharap, melalui proses pembahasan yang terbuka dan kolaboratif, RAPERDA ini dapat disempurnakan, sehingga dapat memenuhi harapan semua pihak dan masyarakat Wonosobo,

serta ketentuan Peraturan Perundangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan ridho Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah dan tanggung jawab pembangunan daerah. Aamiin.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

